



**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGAMBILAN
DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PADA UPT DINAS
PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR
JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya
Program Study Diploma III Manajemen Perusahaan
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh

**Mohamad Iqbal
NIM 110803101004**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**IMPLEMENTATION OF TAKING TAX ADMINISTRATION
AND THE USE OF WATER IN CENTRAL SERVICES UNIT
OF EARNING DEPARTMENT IN JEMBER REGENCY**

REAL PRACTICE REPORTS

Composed that one of rule for acuquring Ahli Madya Title Program Study
Diploma III Management of Company
The Faculty of Economic Jember University

By
MohamadIqbal
NIM 110803101004

**PROGRAM STUDYDIPLOMA III MANAJEMENT OF COMPANY
THE FACULTY OF ECONOMIC
JEMBER UNIVERSITY
2014**

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PADA UPT DINAS PENDAPATAN
PROPINSI JAWA TIMUR JEMBER

Yang dipersiapkandandisusunoleh :

Nama : MOHAMAD IQBAL
N.I.M : 110803101004
Program Studi : MANAJEMEN PERUSAHAAN
Jurusan : MANAJEMEN

telahdipertahankan di depanPanitiaPenguji pada tanggal :

dandinyatakantelahmemenuhisyaratuntukditerimasebagai kelengkapangunamemperolehge
larAhliMadya (A.Md) Program Diploma III padaFakultasEkonomiUniversitasJember.

SusunanPanitiaPenguji

Ketua,

Drs. Hadi Wahyono,M.S.
NIP. 19730908 200003 2 001

Sekretaris,

Drs. NG. Krishnabudi, M.Agb,
NIP.19560404 198503 1 002

Anggota,

Drs. Sampeadi, M.S.
NIP. 19740120 200012 2 001

Mengetahui/Menyetujui

UniversitasJember

FakultasEkonomi

Dekan,

FOTO
4X6

Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E.,M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : MohamadIqbal
NIM : 110803101004
Program Studi : DIII Manajemen Perusahaan
Jurusan : Manajemen Perusahaan
Program Pendidikan : Diploma III FakultasEkonomi
UniversitasJember
Judul : "Pelaksanaan AdministrasiPajak Pengambilan Dan
Pemanfaatan Air PermukaanPada UPT
DinasPendapatanPropinsiJawaTimurJember"

Jember, 05Maret 2015

Mengetahui
Ketua Program Studi
Manajemen Perusahaan
FakultasEkonomi

Laporan Praktek Kerja Nyata
TelahDisetujui Dosen
Pembimbing

Drs. DidikPujdoMusmedi.Ms

NIP. 19 610209 198603 1 001

Dr. BambangIrawan.M.Si

NIP. 19 610317 198802 1 001

PERSEMBAHAN

Karyainikupersembahkankepadasemua orang yang menyayangiku :

1. Ayahku Yohanes Rade Serongdan Ibuku Agustina Palembang,terimakasih yang teramat dalam atas cinta, kasih sayang dan doamu,
2. Kakaku Yorfania Beta Manuruk Dan Yosvandi Beta Manuruk, semogakita menjadi orang yang sukses dan sama-samamembahagiakanorangtuakita,
3. Begitu juga untuk sahabatku tercinta, kawan-kawanku manajemen perusahaan, rekan-rekan organisasi mahapala,
4. Tak lupa juga untuk bapak ibu guru yang telah mendidik saya mulai dari taman kanak-kanak sampai saat ini, dan
5. Almamater yang aku banggakan Universitas Jember.

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula” (QS. Al-Isra’: 7).

Harga kebaikan seseorang di ukur dari apa yang diperbuatnya (Ali bin Abu Thalib)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan, sehingga penyusunan dan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Pelaksanaan Administrasi Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulisan laporan ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md).

Selama Praktek Kerja Nyata sampai dengan penulisan laporan ini telah banyak melibatkan dan memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan anugrah terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Moehammad. Fathorrazi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Didik Pudjo Musmedi. MS. selaku Ketua Jurusan Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Bapak Dr. Bambang Irawan, M.S.i selaku pembimbing yang telah membimbing dalam pembuatan tugas akhir
4. Ibu Endang Budiharti, SE. MM selaku kepala kantor UPT. Dinas Pendapatan Jawa Timur Jember
5. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat
6. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang turut membantu kelancaran dalam menyelesaikan laporan ini

7. Seluruh karyawan Kantor UPT.Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan bantuan moral dan materiil dalam proses penyelesaian tugas akhir

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhirnya, penulis berharap agar laporan yang penulis susun dapat menambah referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

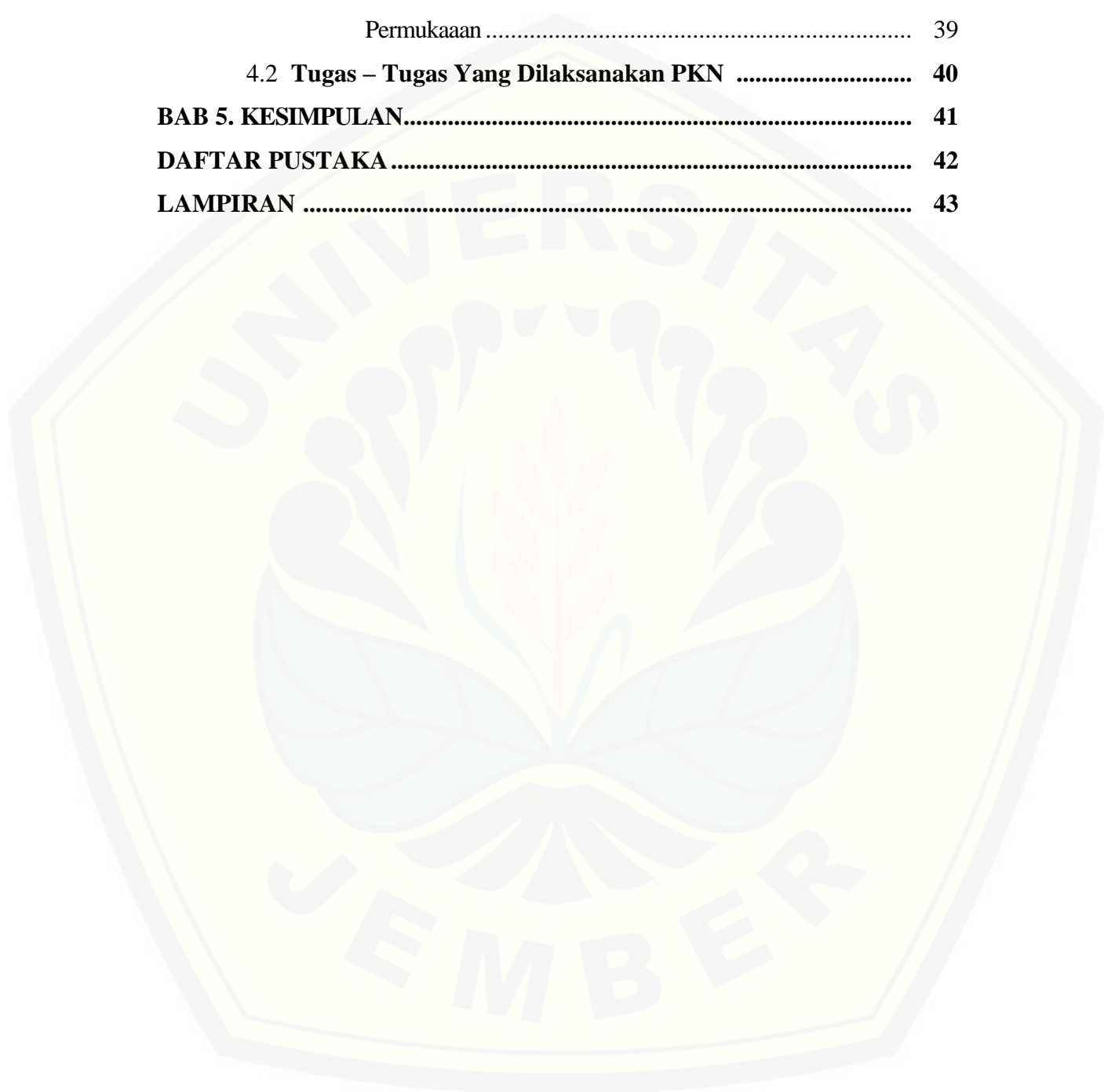
Jember ,Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Objek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata	4
1.3.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.4 Bidang Ilmu	4
1.5 Jadwal Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Administrasi	7
2.1.1 Fungsi Administrasi.....	8
2.1.2 Unsur-Unsur Administrasi.....	9
2.2 Pengertian Pajak.....	9
2.2.1 Asas Pemungutan Pajak	11
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak	11

4.1.5	AdministrasiPenyetoranPenerimaanPajak	Air	
	Permukaan.....		35
4.1.6	AdministrasiPelaporanPenerimaanPajak	Air	
	Permukaan		39
4.2	Tugas – Tugas Yang Dilaksanakan PKN		40
BAB 5. KESIMPULAN.....			41
DAFTAR PUSTAKA			42
LAMPIRAN			43



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Kas Tahunan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.....	3
1.2	KegiatanPraktekKerjaNyata	5
3.1	DaftarJumlahPegawai UPT. DinasPendapatanPropinsiJawaTimurJemberTimur Tahun 2014	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
3.1	Struktur Organisasi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur-Jember	22
4.1	Pendataan dan Pendaftaran Pajak Air Permukaan (PAP).....	29
4.2	Prosedur Penetapan Pajak Air Permukaan (PAP)	30
4.3	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan	31
4.4	Bukti Surat Pembayaran Pajak Air Permukaan	33
4.5	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan	36
4.6	Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan	37
4.7	Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Halaman
1	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan	43
2	Bukti Surat Pembayaran Pajak Air Permukaan	44
3	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	45
4	Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan	46
5	Permohonan Tempat PKN	47
6	Daftar Hadir	48
7	Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	49
8	Surat Keterangan	50
9	Kartu Konsultasi	51

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini negara kita telah mengalami berbagai hambatan dalam bidang pembangunan. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi Negara kita sehingga gejolak perekonomian menjadi tidak stabil. Hal ini sangat mempengaruhi penerimaan negara, padahal penerimaan Negara terbesar diperoleh dari sector pajak sehingga diperlukan peran serta masyarakat sebagai wajib pajak baik secara aktif maupun pasif sehingga dapat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan terhadap negara. Sehubungan dengan besarnya peranan pajak terhadap penerimaan negara, maka pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai jenis pajak yang dipungut.

Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan masyarakat dan Negara dalam proses pembangunan baik itu pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah merupakan tolak ukur dari keberhasilan pembangunan nasional. Salah satu dimensi pembangunan daerah dan arah yang dituju adalah terwujudnya status otonomi daerah yang dinamis, nyata, dan bertanggung jawab. Sedangkan status tersebut diantaranya dapat dilihat dari kemampuan daerah menyediakan dana pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya bersumber kepada pajak daerah. Pajak daerah ini sangat dominan dalam menunjang (PAD) dan mempunyai sumber penerimaan yang terdiri dari beberapa sector pungutan, diantaranya adalah Pajak Air Permukaan (PAP).

PAP adalah pungutan yang dikenakan pada orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai publik. Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 tahun 2001 tentang Pajak Air Permukaan, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang. Pajak

air Permukaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang sangat potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Untuk memperbesar penerimaan P3AP dan juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendirikewajiban serta memenuhikannya dibidang perpajakan. Wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuanper undang- undangan perpajakan. Dalam rangka pembaharuan system perpajakan Daerah dan sejalan dengan perkembangan keadaan, maka pengaturan Pajak Air Permukaan perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan sehingga dapat lebih meningkatkan dayaguna dan hasil guna serta terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah.

Oleh karena pentingnya peranan pajak yang merupakan penyelenggaraan pemerintah di daerah dan merupakan sumberdana bagi pelaksanaan pembangunan di daerah tingkat I maka perlu diketahui system pelaksanaannya yaitu cara pemenuhan dan penyelesaiannya yang baik. AlasanPraktekKerjaNyatapada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember karena merupakan masukan yang menyelenggarakan administrasi keuangan dengan sistem yang baku dan bahkan sudah komputerisasi. Pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Wajib Pajak mendapatkan kemudahan dalam pelayanan prima atau cepat berupaaplikas ikomputer secara online.Dan juga karena P3AP merupakan suatu penerimaan Pemerintah Propinsi. Selain itu UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember mudah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan khususnya mengenai PajakAir Permukaan.

Alasan memilih judul Pelaksanaan Administrasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, karena jumlah realisasi penerimaan kas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan

adanya jumlah target dan realisasi kas pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Kas Tahunan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember (Tahun Anggaran 2011,2012, 2013 dan 2014)

No	Tahun Anggaran	Target Jumlah (Rp.)	Realisasi Jumlah (Rp.)	%
1	2011	85.650.315.250	196.272.192.284	229,16
2	2012	205.642.304.000	206.489.712.471	100,41
3	2013	221.814.703.000	246.210.405.778	111,00
4	s/d Mei 2014	236.339.146.000	98.938.992.841	41,86

Sumber: UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 2014

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah kota Jember Nomor 9 Tahun 2010 bahwa Pajak Air Permukaan dipungut atas pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Sedangkan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10%.

Dengan menilik uraian diatas dan mengingat pentingnya suatu laporan, dimana hal tersebut sangat erat dengan kepentingan Negara atau pun daerah makapelaksanaan PKN pada UPT Dinas Pendapatan Jember ini mengambil judul **“PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PADA UPT DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR JEMBER”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Pelaksanaan Administrasi Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.

b. Untuk membantu Pelaksanaan Administrasi Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan Pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pelaksanaan Administrasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.

b. Sebagai salah satu persyaratan anak akademik dalam penyelesaian studi pada program Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

1.3 Objek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini akan dilaksanakan pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember yang berlokasi di Jl. Kalimantan No.42 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 144 jam. Kerja efektif kurang lebih 1 bulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

1.3.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Perlaksanaan Praktek Kerja Nyata dimulai tanggal 01 September 2014 sampai dengan 30 Oktober 2014 dengan jam kerja sebagai berikut :

1. Senin – Kamis = Pukul 07.00 – 15.30
2. Jum'at = Pukul 06.00 – 14.30
(SKJ dimulaipukul 06.00 WIB)
3. Sabtu dan Minggu = Libur

1.4 Bidang Ilmu

Bidang Ilmu yang mendasari penyusunan laporan ini adalah :

1. Perpajakan
2. Manajemen Keuangan
3. Pengantar Manajemen
4. Reversidari UPT. Dinas Pendapatan Propins Jawa Timur Jember

1.5 JadwalPraktekkerjaNyata

Tabel 1.2 KegiatanPraktekKerjaNyata

No	Keterangan	Minggu			
		1	2	3	4
1.	Perkenalan dengan pimpinan dan staf UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.	X			
2.	Penjelasan gambaran umumdan struktur organisasi UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.	X	X		
3.	Mengumpulkan data yang berkaitandengan prosedurPajak Pengambilan Dan PemanfaatanAir Permukaanpada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.		X	X	X
4.	Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan prosedur akuntansi Pajak Pengambilan dan pemanfaatanAir Permukaanpada UPT. DinasPendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.		X	X	X
5.	Mengakhirikegiatan PKN dengan berpamitan dengan pimpinan beserta staf UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.				X
6.	Konsultasi dengan dosen pembimbing Praktek Kerja Nyata	X	X	X	X

Sumber: data diolah

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi

Secara etimologis istilah administrasi ini lebih dikenal dari bahasa Belanda yang telah menjajah Indonesia selama 350 tahun, dimana pada waktu itu terjadi proses transformasi tatanan kehidupan. sebagai akibat dari sejarah masa itu, masyarakat di Indonesia mengenal istilah bahasa Belanda *Administrasie* yang sudah umum di ucapkan dan ditulis dalam bahasa Indonesia administrasi. Administrasi adalah kegiatan yang mencakup ketatausahaan, manajemen dan organisasi, serta manajemen terhadap unsur-unsur organisasi. Pengertian tersebut memberi gambaran bahwa administrasi mencakup pengelolaan atau mengatur, memimpin, dan pemeliharaan (Poerwanto, 2006 : 9). Pengertian Administrasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Administrasi dalam arti sempit (Poerwanto, 2006:11)

Administrasi adalah tata usaha atau pelaksanaan pekerja intern yang melibatkan manusia, peralatan dan sistematika kerja untuk mendukung ekosistensi organisasi.

2. Administrasi dalam arti luas (Poerwanto, 2006:15)

Administrasi adalah proses kerjasama secara sistematis dari sekelompok manusia yang beriteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien dan saling menguntungkan setrta berkelanjutan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah proses kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada.

2.1.1 Fungsi Administrasi

Menurut Baridwan (2006:4) ada lima jenis *office support functions*(fungsi administrasi perkantoran), yaitu:

1. Fungsi Rutin, yaitu fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran minimal yang mencakup pengarsipan, penggandaan, dan lain-lain.

2. Fungsi Teknis, yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif disertai kemampuan untuk mengambil keputusan dan menganalisis laporan maupun membuat keputusan pembelian.
3. Fungsi Analisis, yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif disertai kemampuan untuk mengambil keputusan dan menganalisis laporan maupun membuat keputusan pembelian.
4. Fungsi Interpersonal, yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta ketrampilan yang berhubungan dengan orang seperti mengkoordinasikan tim proyek.
5. Fungsi Manajerial, yaitu merupakan fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengukuran, pengorganisasian dan pemotivasian, seperti pembuatan anggaran, strategi, dan mengevaluasi karyawan.

Menurut Poerwanto (2006 : 38), ditinjau dari aspek proses kerja sama, administrasi memiliki berbagai fungsi organisasi dan manajemen. Fungsi-fungsi administrasi dibagi menjadi tiga :

1. Formulasi kebijakan, yaitu kegiatan untuk membangun rumusan-rumusan kebijakan yang meliputi:
 - a. Menetapkan tujuan-tujuan
 - b. Membangun sistem keorganisasian
 - c. Membangun ide-ide
 - d. Menyusun strategi dan taktik
2. Pendayagunaan unsur-unsur administrasi meliputi:
3. Sumber daya manusia
 - a. Keuangan
 - b. Peralatan
 - c. Asset tidak bergerak
4. Pengendalian dinamika administrasi, yaitu pelaksanaan kerjasama yang telah didesain dalam kebijakan organisasi.

Berdasarkan uraian dan definisi yang dikemukakan di atas, maka secara sederhana ciri pokok administrasi adalah:

1. Kerja sama dilakukan oleh sekelompok orang
2. Kerja sama dilakukan berdasarkan pembagian kerja sama yang struktur

3. Kerja sama dilakukan untuk mencapai tujuan

Dengan demikian dapat dirumuskan suatu batasan tentang administrasi yaitu kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian tugas bagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Fungsi-fungsi administrasi menggambarkan bahwa kegiatan utama administrasi adalah merumuskan kebijakan organisasi yang didasarkan atas ide-ide seseorang atau para pendiri atau para pemimpin puncak organisasi. Administrasi memiliki unsur-unsur tata tertib yang merupakan kesatuan yang saling berkaitan erat dan saling menunjang dalam memegang seluruh proses pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Unsur-unsur Administrasi

Menurut poerwanto (2006 : 7), administrasi merupakan rangkaian aktifitas yang terdiri dari berbagai unsur yang diawali oleh pemikiran dan kesepakatan bersama antara dua orang atau lebih. Unsur-unsur administrasi tersebut mencakup manusia, tujuan, kemampuan, pembagian adalah penyelenggaraan atau pengatur utama atau unsur-unsur lain. Tujuan, pembagian tugas serta pemanfaatan sumber daya sangat tergantung dari rasionalitas manusia dalam bekerja sama.

2.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan– peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan (Mardiasmo, 2008 : 1), jadi unsur pajak adalah:

1. Iuran kepada negara.
2. Dapat dipaksakan.
3. Berdasarkan Undang – Undang.
4. Tidak mendapat prestasi kembali.
5. Untuk kepentingan umum.

Unsur ini terlaksana apabila wajib pajak tidak membayar hutang pajaknya, maka hutang tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan surat paksa, disita barang – barangnya, dilelang dan sebagainya menurut proses yang ditentukan. Bagi pembayar pajak tidak mendapat jasa dan tidak akan menerima balasan secara langsung atas apa yang telah dibayarnya. Uang dari pajak tersebut akan digunakan membangun fasilitas – fasilitas umum seperti jalan raya, pasar, rumah sakit, dll, yang bisa dinikmati oleh masyarakat nantinya. Pajak negara mempunyai 2 fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi Budgeteir

Yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara / dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur / melaksanakan kebijakn dibidang sosial dan ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam fungsi mengaur, pajak sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

2.2.1 Asas Pemungutan Pajak

Ada 3 asas yang digunakan ketiga asas tersebut adalah(Mardiasmo, 2008: 7)

1. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu warga negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

3. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak : (Mardiasmo, 2008 : 7-8) Ciri-cirinya :

1. *Official Assessment Sistem*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk mendapatkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment Sistem*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif.

3. *With Holding Sistem*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :
Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ke-3, pihak selain fiscus dan Wajib Pajak.

2.2.3 Syarat Menarik Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan perlawanan atau hambatan, maka pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Diusahakan agar pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata sehingga diperoleh tekanan yang sama rata keseluruhan rakyat.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang sangat perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, sehingga dalam penyusunan UU harus diusahakan untuk tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak dan kebijaksanaan pajak diusahakan jangan sampai menghambat perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun dalam

bidang perdagangan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum serta menghalangi usaha rakyat dalam mencapai kesejahteraan.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)
Pemungutan pajak hendaknya tidak menghabiskan biaya pemungutan yang besar dan pemungutannya hendaknya dapat mencegah inflasi.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Memudahkan masyarakat untuk menghitung pajaknya.

2.3 Dasar Hukum Pajak

Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.

2.4 Jenis-jenis Pajak di Indonesia

Pada umumnya, jenis pajak ditentukan berdasarkan perbedaan obyek pajaknya. Pajak yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut Pemerintah Pusat
 - a. Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM).
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - e. Bea Materai.
2. Pajak Propinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA).
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA).
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (BBKB).
 - d. Pajak Kabupaten / Kota
 - a) Pajak Hotel.
 - b) Pajak Restoran.
 - c) Pajak Hiburan.
 - d) Pajak Reklame.

- e) Pajak Penerangan Jalan.
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- g) Pajak Parkir.

2.5 Pengertian Wajib, Subyek, dan Obyek Pajak :

1. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga, bentuk usaha tetap, dan dalam bentuk badan lainnya.

2. Subyek Pajak

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

3. Obyek Pajak

Obyek Pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan utang pajak.

2.6 Pajak Daerah

2.6.1 Pengertian Pajak daerah

Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar Hukum Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

2.6.3 Pengertian Wajib, Subyek, dan Obyek Pajak Daerah

Pengertian Wajib, Subyek, dan Obyek Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. **Wajib Pajak Daerah**
Adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
2. **Subyek Pajak Daerah**
Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
3. **Obyek Pajak Daerah**
Adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan utang pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu 4 (empat) jenis pajak propinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten / kota, yaitu :

1. **Pajak Propinsi**
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA).
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di Atas Air (KAA).
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABTAP).
2. **Pajak Kabupaten / Kota**
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

- g. Pajak Parkir.

2.6.4 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Tarif pajak merupakan salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, sehingga besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengatur tentang tarif pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

1. Tarif Pajak Propinsi
 - a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA) ditetapkan paling tinggi 5%.
 - b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di Atas Air (KAA) ditetapkan paling tinggi 10%.
 - c. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan paling tinggi 5%.
 - d. Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT/AP) ditetapkan paling tinggi 20%.
2. Tarif Pajak Kabupaten / Kota
 - a. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%.
 - b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%.
 - c. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.
 - d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%.
 - e. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%.
 - f. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%.
 - g. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%.

2.7 Dasar Hukum Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan

Ketentuan pokok mengenai mengenai Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air permukaan terdapat dalam:

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 Tentang P3AP
2. Keputusan Kepala Dipenda Propinsi Jawa Timur tanggal 21 januari 2002, Nomor : 08 Tahun 2002 , tentang petunjuk pelaksanaan Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan.

2.8 Dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 terdapat beberapa pengertian istilah yang harus dipahami dalam Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan

Adapun pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan untuk melakukan kewajiban perpajakan
2. Air Permukaan adalah Air yang berada diatas permukaan bumi , termasuk pengambilan dan pemanfaatan air laut yang telah bercampur dengan air lainnya
3. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat menjadi P3AP, adalah pajak yang dipungut atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan untuk keperluan orang pribadi atau badan yang menghasilkan keuntungan.
4. Pengecualian objek P3AP yaitu Air Permukaan yang digunakan oleh :Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air, Kepentingan Pengairan Pertanian Rakyat, Keperluan Dasar Rumah Tangga, Rumah Ibadah dan Badan Sosial Lainnya.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan prundang-undangan Perpajakn Daerah

6. Bukti Pembayaran adalah bukti tertulis wajib pajak telah melunasi pajak terutang yang tercantum dalam SKPD.
7. Nilai Perolehan Air adalah Perhitungan Volume Air, Luas Areal / Daya dan Harga Dasar Air sebagai Dasar Perhitungan pajak terutang.

2.9 Objek Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan

Adapun yang dimaksud dengan Objek Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan Air Permukaan
2. Pemanfaatan Air Permukaan
3. Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan yang digunakan orang pribadi atau badan.

Pengecualian objek Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan yaitu Pemanfaatan Air permukaan oleh :

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
3. Kepentingan Pengairan Pertanian Rakyat.
4. Keperluan Dasar Rumah Tangga, rumah Ibadah, dan Rumah Sosial Lainnya

2.10 Tarif Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan

Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air (NPA) yang merupakan harga dasar air dan dinyatakan dalam Rupiah, Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung menurut sebagian atau seluruh Faktor-faktor , antara lain

1. Jenis Sumber air
2. Lokasi Sumber Air
3. Tujuan Pengambilan Dan Pemanfaatan Sumber Air
4. Volume Air
5. Kualitas Air

6. Luas Areal
7. Musim
8. Tingkat Kerusakan Lingkungan Yang Diakibatkan

2.11 Nomor Kohir Pajak

1. Penggunaan Nomor Kohir Pajak setiap tahun dimulai dengan nomor Urut 1
2. Setiap akhir Tahun pajak nomor kohir ditutup, selanjutnya dibuka kembali untuk pemakaian air bulan dan tahun sebelumnya yang ditetapkan bulan dan tahun berikutnya
3. Pada tahun yang sama nomor kohir pajak melanjutkan nomor kohir bulan sebelumnya

2.12 Tempat Pembayaran

Pembayaran Pajak Pengambilan Dan pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) harus dibayar selambat-lambatnya 30 hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Kegiatan Pembayaran pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) dilaksanakan pada loket penerima pembayaran UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.

BAB 3
GAMBARAN UMUM
OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar Belakang Sejarah

Semula instansi Unit Pelaksanaan Teknis UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Jember bernama Kantor Cabang Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur di Jember, dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dan Kota Administratif Jember Pembentukannya berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 303 Tahun 1977, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/7/39-26, dan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur tanggal 29 November 1978 Nomor 8 Tahun 1978. Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Jember pembagian wilayah kerjanya berubah menjadi:

1. UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Barat dengan wilayah kerja operasional meliputi 17 kecamatan.
2. UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur dengan wilayah operasional meliputi 14 kecamatan.

Pembagian wilayah kerja UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur berdasarkan SK Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Agustus 2001 Nomor 35 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

1. UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Barat dengan wilayah kerja operasional meliputi 17 kecamatan, yaitu : Rambipuji, Sukorambi, Panti, Jenggawa, Ajung, Balung, Wuluhan, Ambulu, Tanggul, Semboro, Sumberbaru, Bangsalsari, Gumukmas, Puger, Umbulsari.
2. UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur dengan wilayah kerja operasional meliputi 14 kecamatan, yaitu : Summersari, Patrang, Kaliwates, Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Kalisat, Pakusari, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang, Silo, Tempurejo, Mumbulsari.



**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGAMBILAN
DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PADA UPT DINAS
PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR
JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya
Program Study Diploma III Manajemen Perusahaan
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh

**Mohamad Iqbal
NIM 110803101004**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**IMPLEMENTATION OF TAKING TAX ADMINISTRATION
AND THE USE OF WATER IN CENTRAL SERVICES UNIT
OF EARNING DEPARTMENT IN JEMBER REGENCY**

REAL PRACTICE REPORTS

Composed that one of rule for acuquring Ahli Madya Title Program Study
Diploma III Management of Company
The Faculty of Economic Jember University

By
MohamadIqbal
NIM 110803101004

**PROGRAM STUDYDIPLOMA III MANAJEMENT OF COMPANY
THE FACULTY OF ECONOMIC
JEMBER UNIVERSITY
2014**

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PADA UPT DINAS PENDAPATAN
PROPINSI JAWA TIMUR JEMBER

Yang dipersiapkandandisusunoleh :

Nama : MOHAMAD IQBAL
N.I.M : 110803101004
Program Studi : MANAJEMEN PERUSAHAAN
Jurusan : MANAJEMEN

telahdipertahankan di depanPanitiaPenguji pada tanggal :

dandinyatakantelahmemenuhisyaratuntukditerimasebagai kelengkapangunamemperolehge
larAhliMadya (A.Md) Program Diploma III padaFakultasEkonomiUniversitasJember.

SusunanPanitiaPenguji

Ketua,

Drs. Hadi Wahyono, M.S.
NIP. 19730908 200003 2 001

Sekretaris,

Drs. NG. Krishnabudi, M.Agb,
NIP.19560404 198503 1 002

Anggota,

Drs. Sampeadi, M.S.
NIP. 19740120 200012 2 001

Mengetahui/Menyetujui

UniversitasJember

FakultasEkonomi

Dekan,

FOTO
4X6

Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : MohamadIqbal
NIM : 110803101004
Program Studi : DIII Manajemen Perusahaan
Jurusan : Manajemen Perusahaan
Program Pendidikan : Diploma III FakultasEkonomi
UniversitasJember
Judul : "Pelaksanaan AdministrasiPajak Pengambilan Dan
Pemanfaatan Air PermukaanPada UPT
DinasPendapatanPropinsiJawaTimurJember"

Jember, 05Maret 2015

Mengetahui
Ketua Program Studi
Manajemen Perusahaan
FakultasEkonomi

Laporan Praktek Kerja Nyata
TelahDisetujui Dosen
Pembimbing

Drs. DidikPujdoMusmedi.Ms

NIP. 19 610209 198603 1 001

Dr. BambangIrawan.M.Si

NIP. 19 610317 198802 1 001

PERSEMBAHAN

Karyainiku persembahkan kepada semua orang yang menyayangiku :

1. Ayahku Yohanes Rade Serongdan Ibuku Agustina Palembang, terimakasih yang teramat dalam atas cinta, kasih sayang dan doamu,
2. Kakaku Yorfania Beta Manuruk Dan Yosvandi Beta Manuruk, semoga kita menjadi orang yang sukses dan sama-sama membahagiakan orang tua kita,
3. Begitu juga untuk sahabatku tercinta, kawan-kawanku manajemen perusahaan, rekan-rekan organisasi mahapala,
4. Tak lupa juga untuk bapak ibu guru yang telah mendidik saya mulai dari taman kanak-kanak sampai saat ini, dan
5. Almamater yang aku banggakan Universitas Jember.

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula” (QS. Al-Isra’: 7).

Harga kebaikan seseorang di ukur dari apa yang diperbuatnya (Ali bin Abu Thalib)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan, sehingga penyusunan dan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Pelaksanaan Administrasi Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulisan laporan ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md).

Selama Praktek Kerja Nyata sampai dengan penulisan laporan ini telah banyak melibatkan dan memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan anugrah terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Moehammad. Fathorrazi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Didik Pudjo Musmedi. MS. selaku Ketua Jurusan Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Bapak Dr. Bambang Irawan, M.S.i selaku pembimbing yang telah membimbing dalam pembuatan tugas akhir
4. Ibu Endang Budiharti, SE. MM selaku kepala kantor UPT. Dinas Pendapatan Jawa Timur Jember
5. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat
6. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang turut membantu kelancaran dalam menyelesaikan laporan ini

7. Seluruh karyawan Kantor UPT.Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan bantuan moral dan materiil dalam proses penyelesaian tugas akhir

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhirnya, penulis berharap agar laporan yang penulis susun dapat menambah referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jember ,Maret 2015

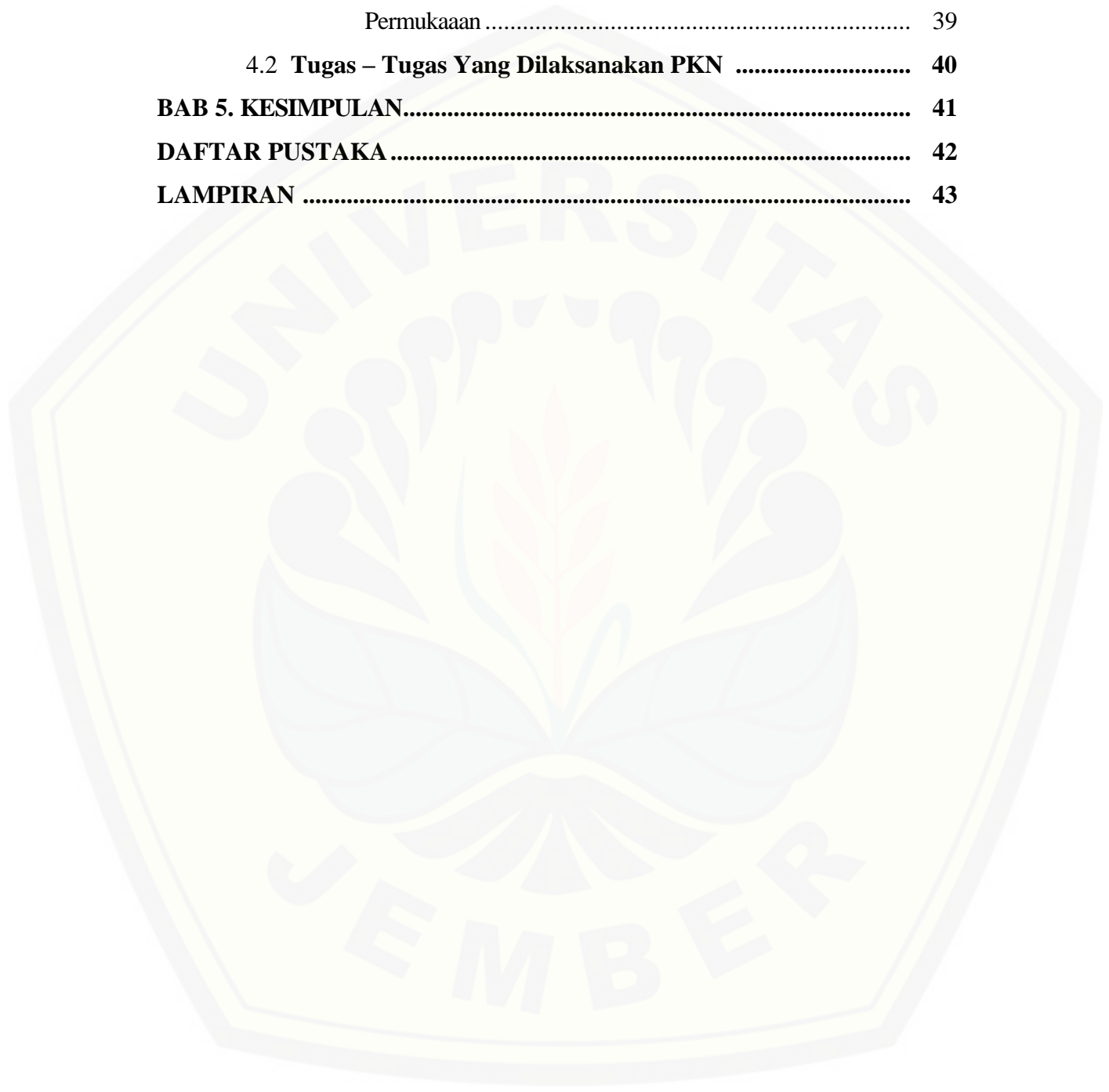
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Objek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata	4
1.3.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.4 Bidang Ilmu	4
1.5 Jadwal Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Administrasi	7
2.1.1 Fungsi Administrasi.....	8
2.1.2 Unsur-Unsur Administrasi.....	9
2.2 Pengertian Pajak.....	9
2.2.1 Asas Pemungutan Pajak	11
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak	11

2.2.3	SyaratMenarikPajak	12
2.3	Dasar Hukum Pajak	12
2.4	Jenis-JenisPajak di Indonesia.....	13
2.5	Pengertian Wajib, Subyek, dan Obyek Pajak.....	13
2.6	Pajak Daerah	14
2.6.1	PengertianPajak Daerah	14
2.6.2	DasarHukumPajak Daerah	14
2.6.3	PengertianWajib, Subyek, danObyekPajak Daerah.....	14
2.6.4	TarifPenaanPajak Daerah.....	15
2.7	DasarHukum P3AP	16
2.8	PengertianIstilah P3AP	17
2.9	Objek Pajak P3AP	18
2.10	Tarif Pajak P3AP.....	18
2.11	NomorKohir P3AP	19
2.12	TempatPembayaran	19
BAB 3.	GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA.....	20
3.1	LatarBelakangSejarah.....	20
3.2	StrukturOrganisasi	21
3.2.1	Personaliala.....	27
3.3	Pokok UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa TimurJember ..	28
3.4	KegiatanPemungutanPajak Air Permukaan	28
BAB 4.	HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	29
4.1	PelaksanaanAdministrasiPemungutanPengambilan	29
Dan PemnafaatanPajak Air Permukaan	29	
4.1.1	Administrasi PencatatandanPendaftaranwajibpajak	29
4.1.2	AdministrasiPenetapanBesarnyaPajak Air Permukaan.....	29
4.1.3	AdministrasiPenagihanPajak Air Permukaan	33
4.1.4	AdministrasiPenerimaanPembayaranPajak Air Permukaan	33

4.1.5	AdministrasiPenyetoranPenerimaanPajak	Air	
	Permukaan.....		35
4.1.6	AdministrasiPelaporanPenerimaanPajak	Air	
	Permukaan		39
4.2	Tugas – Tugas Yang Dilaksanakan PKN		40
BAB 5. KESIMPULAN.....			41
DAFTAR PUSTAKA			42
LAMPIRAN			43



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Kas Tahunan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.....	3
1.2	KegiatanPraktekKerjaNyata	5
3.1	DaftarJumlahPegawai DinasPendapatanPropinsiJawaTimurJemberTimur 2014	UPT. 27 Tahun

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
3.1	Struktur Organisasi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur-Jember	22
4.1	Pendataan dan Pendaftaran Pajak Air Permukaan (PAP).....	29
4.2	Prosedur Penetapan Pajak Air Permukaan (PAP)	30
4.3	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan	31
4.4	Bukti Surat Pembayaran Pajak Air Permukaan	33
4.5	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan	36
4.6	Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan	37
4.7	Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Halaman
1	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan	43
2	Bukti Surat Pembayaran Pajak Air Permukaan	44
3	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	45
4	Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan	46
5	Permohonan Tempat PKN	47
6	Daftar Hadir	48
7	Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	49
8	Surat Keterangan	50
9	Kartu Konsultasi	51

BAB 4

HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember dilakukan dengan cara terjun langsung ke instansi tersebut dan diperbantukan ke dalam seksi-seksi dinas yang ada hubungannya dengan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan.

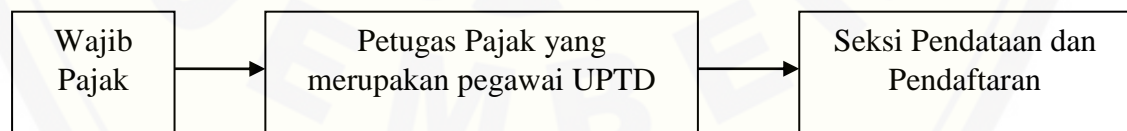
4.2 Administrasi Pajak Air Permukaan

Adapun kegiatan yang dilakukan Pelaksanaan Administrasi pajak pengambilan dan pemanfaatan Air permukaan (P3AP) sebagai berikut:

1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak
2. Penetapan
3. Pembayaran dan pelunasan
4. Penagihan dan dinas luar

4.2.1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak Air permukaan (PAP)

Pendataan pendaftaran pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember dilaksanakan oleh petugas pajak dengan cara mendatangi langsung tempat objek pajak (wajib pajak), kemudian hasil dari pendataan yang telah dilakukan petugas pajak diserahkan pada kasi pendataan dan pendaftaran. Proses selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, dalam hal ini pihak pendataan dan pendaftaran hanya merekap nomor, tanggal, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis dan nomor berkas pemakaian.



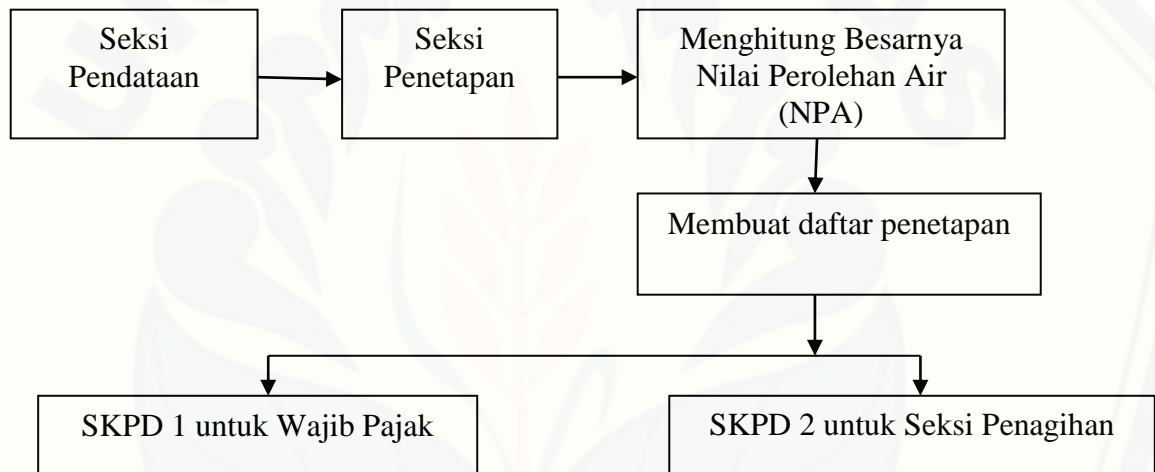
Gambar 4.1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak Air Permukaan

Sumber : UPT. Dinas Pendapatan provinsi Jawa Timur 2014

4.2.2 Administrasi Penetapan Pajak Air Permukaan (PAP)

Pelaksanaan administrasi penetapan yaitu kasi penetapan menerima data dari kasi pendataan dan pendaftaran kemudian melakukan perhitungan besarnya

nilai pemakaian air. Setelah itu bagian penetapan mencatat data data yang berupa nomor, tanggal, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis dan nomor berkas, tarif pajak, nomor kahir, volume/areal/daya, nilai perolehan air dan besarnya ketetapan pajak. Selanjutnya data data tersebut dimasukan kedalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Formulir ini berjumlah dua lembar, formulir pertama dikembalikan kepada petugas pajak untuk dikirimkan kewajib pajak dan lembar kedua diberikan kepada seksi penagihan dinas luar untuk dijadikan arsip. Apabila dalam waktu pengiriman mengalami kesulitan karena jarak yang ditempuh jauh, maka petugas pajak menggunakan jasa pos untuk mengirimkan kepada wajib pajak. Prosedur Penetapan Pajak Air Permukaan (Disajikan dalam gambar 4.2)



Gambar 4.2 Prosedur Penetapan Pajak Air Permukaan
Sumber : UPT. Dinas Pendapatan provinsi Jawa Timur 2014

- a. Seksi pendataan merupakan mendata wajib pajak yang sudah ditentukan
- b. Seksi Penetapan menerima pendataan dari wajib pajak yang diperoleh
- c. Menghitung besarnya nilai perolehan air yang sudah menjadi ketetapan wajib pajak daerah
- d. Membuat daftar penetapan dan mencatat data data
- e. SKPD 1 dikembalikan kepada petugas pajak untuk dikirim kewajib pajak
- f. SKPD 2 diberikan kepada seksi penagihan dan dinas luar sebagai arsip

Nomor: 0015461

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
JEMBER
 TERATAI NO. 10-11 JEMBER

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)

Nomor Berkas	0031/AP	Peruntukan	PDAM
Nama Wajib Pajak	PDAM (IPA WIROLEGI)	No. Kohir	000023/AP/71/1/2014
Alamat Wajib Pajak	DL TRUNOJOYO 73 JEMBER	Bagian Bulan	JANUARI
Nama Perusahaan	PDAM JEMBER	Tahun	2014
Alamat Perusahaan	DL TRUNOJOYO 73 JEMBER	Ditetapkan Tanggal	10/02/2014

Jatuh tempo pembayaran : 12/03/2014

PENGHITUNGAN PAJAK

Jenis Pungutan	Volume Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
PAP	43.305,00 M3	112	10%	485.050
JUMLAH				485.050

EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU LIMA PULUH RUPIAH ==

Catatan:

1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan
3. Pembayaran dilakukan pada kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... Jalan
4. Apabila pajak telah dilunasi Surat ini mohon diabaikan, terima kasih.

JEMBER, 10-02-2014
 An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur

[Signature]
ENDANG BUDIHATI, SE., MM.
 PEMBTNA
 19651121 199111 2 001

Gambar 4.3 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan
 Sumber : UPT. Dinas Pendapatan provinsi Jawa Timur 2014

Adapun rumus perhitungan Pajak Air permukaan adalah:

$$\text{Volume Air} \times \text{NPA} = \text{Harga Dasar Air}$$

$$\text{Pajak yang terutang} = \text{Tarif} \times \text{Harga Dasar Air}$$

Keterangan

NPA : Nilai Perolehan Air

Tarif : 10%

Volume : Volume Pemakaian Air

Contoh Perhitungan Pajak Air Permukaan (PAP)

1. Perhitungan Pajak Air Permukaan Pada PT. Suka Made, peruntukan Industri diperoleh data :

- Volume pemakaian air = 540 m^3
- Nilai Perolehan air = Rp 500,00
- Tarif Air Permukaan = 10%

Cara Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Harga Dasar Air} &= \text{Volume Pemakaian Air} \times \text{NPA} \\ &= 540 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 500,00 \\ &= \text{Rp } 270.000,00 \end{aligned}$$

Jadi besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang :

$$\begin{aligned} \text{Tarif} \times \text{Harga Dasar Air} &= 10\% \times \text{Rp } 270.000,00 \\ &= \text{Rp } 27.000,00 \end{aligned}$$

2. Perhitungan Pajak Air Permukaan Hotel Palm, peruntukan Pengisian Pemandian. Diperoleh Data :

- Volume Pemakaian Air = 279 m^3
- Nilai Perolehan Air = Rp 470,00
- Tarif Air Permukaan = 10%

Cara Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Harga Dasar air} &= \text{Volume Pemakaian Air} \times \text{NPA} \\ &= 279 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 470,00 \\ &= \text{Rp } 131.130,00 \end{aligned}$$

Jadi, besarnya pajak air permukaan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Tarif} \times \text{Harga Dasar Air} &= 10\% \times \text{Rp } 131.130,00 \\ &= \text{Rp } 13.113,00 \end{aligned}$$

4.2.3 Pembayaran dan Pelunasan Pajak Air Permukaan (PAP)

Pelaksanaan Administrasi Pembayaran dan Pelunasan Pajak air Permukaan terdiri dari dua kegiatan yaitu :

1. Menerima Pembayaran Pajak Air Permukaan

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) melakukan pembayaran atau pelunasan PAP di kantor UPT. Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. Syarat dalam pembayaran atau pelunasan Pajak Air Permukaan (PAP) wajib pajak harus membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan SKPD, dalam ini KTP harus sesuai dengan identitas wajib pajak yang bersangkutan. Setelah melakukan pembayaran maka wajib pajak memperoleh bukti pembayaran. Bukti pembyaran terdiri atas empat lembar yang sama,lembar satu untuk wajib pajak,lembar kedua diberikan kepada seksi penagihan dan dinas luar digabungkan dengan seksi penetapan, lembar ketiga diberikan kepada bagian kasir UPT dan lembar keempat untuk arsip.Contoh bukti pembayaran sebagai berikut

Nomor : 0017418

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
JEMBER
TERATAI NO. 10-11 JEMBER

BUKTI PEMBAYARAN
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)

Nomor Berkas	: 0031/AP	Nomor Kohir	: 000023/AP/71/I/2014
Nama Wajib Pajak	: PDAM (IPA WIROLEGI)	Bulan	: JANUARI 2014
Alamat Wajib Pajak	: JL. TRUNOJOYO 73 JEMBER	Peruntukan	: PDAM
Nama Perusahaan	: PDAM JEMBER		
Alamat Perusahaan	: JL. TRUNOJOYO 73 JEMBER		

PENGHITUNGAN PAJAK				
Jenis Pungutan	Volume Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
PAP	43.305,00 M3	112	10%	485.050
Bunga :				0
JUMLAH				485.050

== ENPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU LIMA PULUH RUPIAH ==

1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
 2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan
 3. Pembayaran dilakukan pada kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....
 Jaiian

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
 Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur
JEMBER
LINDA YUNI WULANDARI
 PENGATUR MUDA
 19750622 201001 2 001

Gambar 4.4 Bukti Surat Pembayaran Pajak Air Permukaan

Sumber : UPT. Dinas Pendapatan provinsi Jawa Timur 2014

2. Mengisi nomor berkas sesuai dengan nomor urut wajib pajak saat pertama kali mendaftar;
3. Mengisi nama wajib pajak sesuai dengan data yang diperoleh dari seksi penetapan;
4. Mengisi alamat wajib pajak sesuai dengan data yang diperoleh dari seksi penetapan;

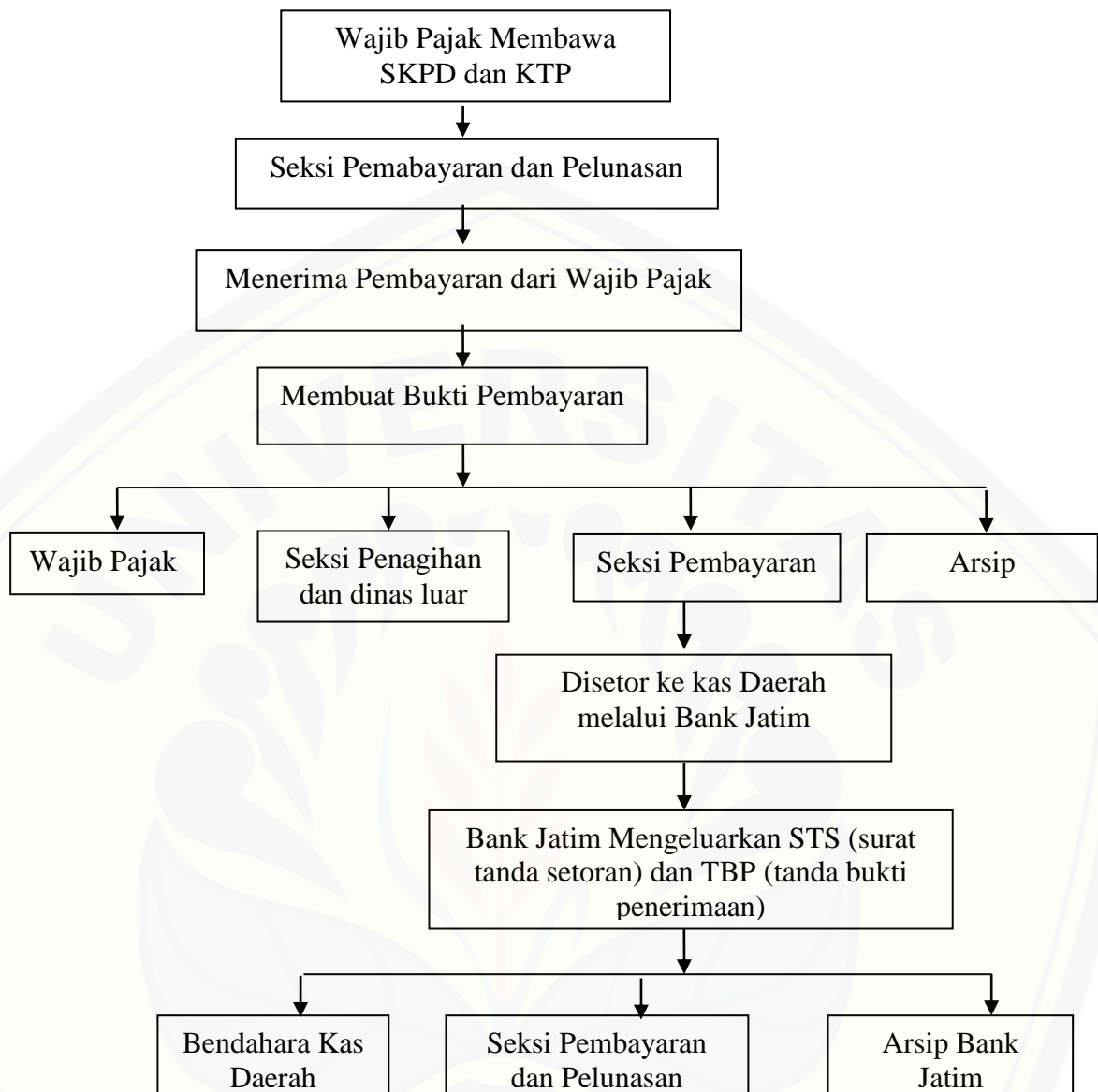
5. Mengisi nama perusahaan sesuai dengan data yang diperoleh dari seksi penetapan;
6. Mengisi alamat perusahaan sesuai dengan data yang diperoleh dari seksi penetapan;
7. Mengisi peruntukan sesuai dengan jenis kegiatan pemakaian dan penggunaan air
8. Mengisi tanggal pembayaran;
9. Nomor Kahir sesuai dengan urutan membayar, contohnya: 000023/AP/71/I/2014 ketentuan penulisannya adalah:
 - a. Nomor 000023 merupakan nomor urutan membayar yang dicatat oleh pegawai selama satu tahun;
 - b. AP merupakan jenis pajak;
 - c. 71 merupakan nomor kode Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember;
 - d. I menunjukkan bulan pemakaian;
 - e. 2014 merupakan tahun pembayaran.
10. Mengisi bulan sesuai dengan bulan pembayaran;
11. Mengisi bagian tahun sesuai dengan data yang diperoleh dari bagian penetapan;
12. Mengisi jenis pemungutan sesuai dengan data yang diperoleh dari seksi penetapan;
13. Mengisi volume areal/daya sesuai dengan data yang diperoleh dari seksi penetapan;
14. Mengisi nilai perolehan air sesuai dengan data yang diperoleh dari penetapan;
15. Mengisi tarif pajak sesuai dengan ketetapan;
16. Mengisi pajak terutang sesuai dengan ketetapan;
17. Mengisi besarnya pajak terutang sesuai dengan ketetapan cara menghitungnya yaitu mengalikan volume dengan nilai perolehan air dan tarif pajak;
18. Mengisi tanggal pembayaran dan pelunasan berdasarkan tanggal pembayaran wajib pajak.

19. Melakukan penyetoran atas pembayaran dan pelunasan Pajak Air Permukaan.

Melakukan penyetoran atas pembayaran dan pelunasan Pajak Air Permukaan adalah menyetorkan hasil pajak yang diterima dari wajib pajak oleh seksi pembayaran dan pelunasan kepada Kantor Kas Daerah (Jawa Timur) di Surabaya. Dalam hal ini pembayaran dilakukan melalui Bank Jatim. Proses pembayarannya dibantu Bendahara khusus penerima perekap bukti penerimaan PAP. Dalam hal ini bendahara khusus penerima melakukan penyetoran kepada kas Daerah disertai surat tanda setoran (STTS). Tembusan surat tanda setoran yaitu kepada fungsi ankuntan, SPK pencatat dan Bank (dilampiri slip setoran Bank). Setelah pelunasan maka bendahara khusus menerima Tanda Bukti Penerimaan (TBP).

Prosedur dan penjelasan secara rinci mengenai pembayaran dan pelunasan Pajak Air Permukaan dapat dilihat pada gambar 4.5

1. Wajib Pajak membawa SKPD dan KTP untuk proses pembayaran
2. Seksi pembayaran dan pelunasan dari pihak kantor UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember
3. Menerima pembayaran dari wajib pajak yang diperoleh dari penetapan
4. Membuat bukti pembayaran dari wajib pajak yang diperoleh dari penetapan
5. Wajib pajak,seksi penagihan dan dinas luar,seksi pembayaran,arsip untuk disetor ke kas daerah melalui Bank Jatim
6. Kemudian Bank Jatim mengeluarkan STS (Surat Tanda Setoran) dan TBP (Tanda Bukti Penerimaan)
7. Bendahara Kas Daerah menerima hasil setoran dari Bank Jatim
8. Seksi pembayaran dan pelunasan yang sudah dibayar melalui Bank Jatim dari pihak wajib pajak
9. Arsip Bank Jatim menyimpan semua data tentang proses pembayaran pajak,terutama pada pajak air permukaan yang sudah dilunasi oleh wajib pajak



Gambar 4.5 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan
 Sumber: UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timurb Jember 2014

4.2.4 Administrasi Penagihan dan Dinas luar Pajak Air Permukaan (PAP)

Pelaksanaan Administrasi penagihan dinas luar Pajak Air Permukaan (PAP) yaitu dimulai dari penggabungan antara Tindakan Surat Ketetapan dengan tindakan Bukti Pembayaran. Penggabungan ini berfungsi untuk ketetapan adanya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran. Seksi atau petugas Penagihan dan Dinas Luar melakukan penagihan kepada wajib pajak yang tidak membayar

kewajibannya maka dilakukan penagihan dan dinas luar berdasarkan penggabungan antara tindakan surat ketetapan dengan tindakan Bukti Pembayaran. Penagihan itu dilandasi dengan adanya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran terhitung mulai 30 hari sejak tanggal penetapan, surat tagihan daerah hanya dikeluarkan sekali, selanjutnya akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% per-bulan dari jumlah yang ditentukan.

Prosedur Penagihan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.6 Prosedur Penagihan dan Dinas Luar Pajak Air Permukaan
Sumber: UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 2014



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
 Dispenda Propinsi Jawa Timur
 Kalimantan 42 Jember

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
 (SPTPD)

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001)

Nomor Berkas : 0031/AP
 Nama Wajib Pajak : PDAM Jember
 Alamat Wajib Pajak : Jl. Trunojaya 73 Jember
 Nama Perusahaan : IPA Wiradegi
 Alamat Usaha : Jl. Mahanti Wiradegi
 Nomor / Tanggal Ijin :
 Volume Air yang diijinkan :
 Peruntukan :
 Bagian bulan : Januari
 Tahun : 2014

PENGHITUNGAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR			
AIR BAWAH TANAH		AIR PERMUKAAN	
1. PENUNJUKAN METER AIR			
Hari ini :	M3	Hari ini :	1.402.076 M3
Bulan lalu :	M3	Bulan lalu :	1.358.771 M3
Volume air :	M3	Volume air :	43.305 M3
2. BUKAN METER AIR			
Debit air :	Lt/detik	a. Debit air :	Lt/detik
Penggunaan 1 hari :	Jam	Penggunaan 1 hari :	Jam
Penggunaan 1 bulan :	Hari	Penggunaan 1 bulan :	Hari
..... x x 3600 x x M3	 x x 3600 x x M3	
1000		1000	
=	M3	=	M3
		a. Luas Areal	Hektar
		b. Daya	PK
KETERANGAN			
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
43.305 x 112 x 10% = 485.8016		Tgl. 3-02-2014.	
Petugas,		 Direktur Utama,	

Form PJK, ABT & AP 01

Gambar 4.7 Prosedur Penagihan dan Dinas luar Pajak Air Permukaan
 Sumber: UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 2014

4.3 Penilaian terhadap UPT Dinas Pendapatan Jawa Timur Jember

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Air Permukaan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 sesuai prosedur

yang ada. Pemungutan Pajak Air Permukaan sejauh ini sudah berjalan dengan baik, sistem pemungutan Pajak Air Permukaan dengan Official Assesment Sistem adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya petugas pajak telah efektif dalam melakukan pendapatan terhadap wajib pajak yang mengambil dan memanfaatkan Air Permukaan. Hal ini ditandai dengan kelancaran pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) oleh wajib pajak kepada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember setiap bulannya. Pendapatan telah dilakukan dengan yang sebenarnya sesuai dengan kapasitas air yang digunakan petugas pajak dalam melakukan pendataan dalam menghitung besarnya pemakaian debit air menggunakan alat yang dikenal Flowmeter sehingga lebih mudah dan efisien. Begitu juga penetapan, semua berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga dalam pembayaran dan pelunasan antara wajib pajak kepada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember yang telah dilakukan pengamatan hampir tidak ada masalah, hanya saja kurang pemahamannya wajib pajak tentang prosedur Pajak Air Permukaan (PAP). Namun masih ada beberapa objek pajak yang tidak terdata, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan izin, karena telah memakai dan memanfaatkan Air Permukaan dalam perusahaan atau industri.

UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember untuk lebih meningkatkan Pendapatan Pajak Air Permukaan seharusnya diadakan survei tentang objek pajak secara periodik agar tidak ada objek pajak yang terlewatkan. UPT, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember agar lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya pembayaran pajak terutama Pajak Air Permukaan. Karena dengan membayar pajak maka kontraprestasi yang ditunjukkan pemerintah dapat kita rasakan melalui pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan tetap menjaga kelestarian alam.

BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata ini, dalam Pelaksanaan Administrasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember dapat disimpulkan bahwa ada empat kegiatan yaitu:

1. Administrasi Pendataan dan Pendaftaran

Pelaksanaan Administrasi Pendataan dan Pendaftaran di UPT.Dinas Pendapatan Jawa Timur Jember dimulai dari wajib Pajak mendaftarkan diri dengan membawa surat ijin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember,kemudian hasil pendataan oleh petugas pajak siserahkan kepada kasi pendataan dan pendaftaran.

2. Administrasi Penetapan

Pelaksanaan Administrasi Penetapan yaitu seksio penetapan menerima data dari seksi Pendataan dan Pendaftaran kemudian melakukan perhitungan besarnya Nilai Pemakaian Air (NPA). Setelah itu bagian penetapan mencatat data-data yang berupa nomor ,tanggal,nama wajib pajak,alamat wajib pajak,jenis dan nomor berkas,tarif pajak,nomor kahir,volume/areal/daya, nilai perolehan air dan besarnya ketetapan pajak.Selanjutnya data-data tersebut dimasukkan kedalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

3. Administrasi Pembayaran dan Pelunasan

Pelaksanaan Administrasi Pembayaran dan Pelunasan Pajak Air Permukaan terdiri dari dua kegiatan yaitu: wajib pajak yang telah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) melakukan pembayaran atau pelunasan Pajak Air Permukaan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.syaratnya dalam pembayaran atau pelunasan Pajak Air Permukaan (PAP) wajib pajak harus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan SKPD dalam hal ini KTP harus sesuai dengan identitas wajib pajak yang bersangkutan.Setelah melakukan pembayaran maka wajib pajak memperoleh bukti pembayaran. Selanjutnya untuk Pelunasan ,seksi pembayaran melakukan penyetoran kepada Kantor Kas Daerah

melalui Bank Jatim. Proses pembayarannya adalah pembantu bendahara atau kasir UPTD penerima bukti penerimaan PAP yang kemudian diserahkan kepada bendahara khusus penerima. Kemudian bendahara khusus penerima melakukan penyetoran kepada Kas Daerah disertai Surat Tanda Setoran (STS) dan mendapat tanda bukti Penerimaan (TBP).

4. Administrasi Penagihan dan Dinas Luar

Pelaksanaan Administrasi Penagihan dan Dinas Luar Pajak Air Permukaan (PAP) yaitu dimulai dari penggabungan antara tindakan Surat Ketetapan dengan tindakan Bukti Pembayaran. Penggabungan ini berfungsi untuk mengontrol adanya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran wajib pajak. Petugas Penagihan dan Dinas Luar melakukan penagihan terhadap wajib pajak dengan disertakan Surat Tagihan Pajak Daerah, jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran terhitung mulai 30 hari sejak tanggal penetapan. Surat Tagihan Pajak Daerah dikeluarkan sekali, selanjutnya dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% per-bulan dari yang ditentukan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya membantu pelaksanaan administrasi pembayaran Pajak Air Permukaan adalah sebagai berikut:

1. Membantu bagian pendataan dan Pendaftaran
2. Membantu bagian Penetapan Pajak Air Permukaan
3. Membantu bagian Pelayanan dan Penyerahan

Hal-hal positif yang bisa diambil dari kegiatan PKN ini antara lain sebagai berikut:

1. Belajar disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
2. Memahami proses administrasi pajak daerah, khususnya Pajak Air Permukaan
3. Belajar berinteraksi dalam lingkungan kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2007. *Sistem informasi manajemen*. Jakarta: Bumi aksara
- Buku Panduan Pendapatan Daerah UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2002.
- _____.2007. *Undang-Undang Nomor 28 tentang Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- _____.2009.*Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah*.
- _____.2010.*Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Pajak Daerah*.
- _____.2002.*Keputusan Kepala Dipenda propinsi Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan*.
- _____. 2010. *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 116 Tentang Pajak Pemanfaatan Bawah Tanah dan Air Permukaan*.
- _____. 2012.*Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 41 tentang Nilai Perolehan Air (NPA)*.
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- Poerwanto. 2006. *New Business Administrasion*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karyailmiah*. Jember: Jember University Press

Lampiran 1

Nomor: 0015461

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
JEMBER
 TERATAI NO. 10-11 JEMBER

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)

Nomor Berkas	0031/AP	Peruntukan	PDAM
Nama Wajib Pajak	PDAM (IPA WIROLEGI)	No. Kohir	000023/AP/71/I/2014
Alamat Wajib Pajak	JL TRUNOJOYO 73 JEMBER	Bagian Bulan	JANUARI
Nama Perusahaan	PDAM JEMBER	Tahun	2014
Alamat Perusahaan	JL TRUNOJOYO 73 JEMBER	Ditetapkan Tanggal	10/02/2014

Jatuh tempo pembayaran : 12/03/2014

PENGHITUNGAN PAJAK

Jenis Pungutan	Volume Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
PAP	43.305,00 M3	112	10%	485.050
EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU LIMA PULUH RUPIAH == JUMLAH				485.050

Catatan:


1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan
3. Pembayaran dilakukan pada kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... Jalan
4. Apabila pajak telah dilunasi Surat ini mohon diabaikan, terima kasih.

JEMBER, 10-02-2014
 An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur

[Signature]
JEMBER
 ENDANG BUDIHATI, SE., MM.
 PEMBINA
 19651121 199111 2 001

Lampiran 2

Nomor : 0017418



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
 JEMBER
 TERATAI NO. 10-11 JEMBER

BUKTI PEMBAYARAN
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)

Nomor Berkas : 0031/AP Nama Wajib Pajak : PDAM (IPA WIROLEGI) Alamat Wajib Pajak : JL TRUNOJOYO 73 JEMBER Nama Perusahaan : PDAM JEMBER Alamat Perusahaan : JL TRUNOJOYO 73 JEMBER	Nomor Kohir : 000023/AP/71/I/2014 Bulan : JANUARI 2014 Peruntukan : PDAM
---	--

PENGHITUNGAN PAJAK

Jenis Pungutan	Volume Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
PAP	43.305,00 M3	112	10%	485.050
Bunga :				0
JUMLAH				485.050

== ENPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU LIMA PULUH RUPIAH ==
 Catatan:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. 2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan 3. Pembayaran dilakukan p a d a kantor U P T D Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... Jalan 	AD KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur JEMBER LINDA YUNI WULANDARI PENGATUR MUDA 19750622 201001 2 001
--	---

Lampiran 3

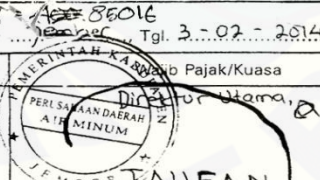


PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
 Dispenda Propinsi Jawa Timur
 Jl. Kalimantan 42, Jember

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
 (SPTPD)

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001)

Nomor Berkas : 0031/AP
 Nama Wajib Pajak : PDAM Jember
 Alamat Wajib Pajak : Jl. Trunojoyo 73 Jember
 Nama Perusahaan : IPA Wiralegi
 Alamat Usaha : Jl. Mahoni Wiralegi
 Nomor / Tanggal Ijin :
 Volume Air yang diijinkan :
 Peruntukan :
 Bagian bulan : Januari
 Tahun : 2014

PENGHITUNGAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR			
AIR BAWAH TANAH		AIR PERMUKAAN	
1. PENUNJUKAN METER AIR			
Hari ini	M3	Hari ini	1.402.076 M3
Bulan lalu	M3	Bulan lalu	1.358.771 M3
Volume air	M3	Volume air	43.305 M3
2. BUKAN METER AIR			
Debit air	Lt/detik	a. Debit air	Lt/detik
Penggunaan 1 hari	Jam	Penggunaan 1 hari	Jam
Penggunaan 1 bulan	Hari	Penggunaan 1 bulan	Hari
..... x x 3600 x x M3	 x x 3600 x x M3	
1000		1000	
= M3		= M3	
		a. Luas Areal Hektar
		b. Daya PK
KETERANGAN			
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
43.305 x 112 x 10% = 485.86016		Tgl. 3.02.2014	
Petugas,		 Kepala Kantor Pajak/Kuasa PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JEMBER	

Form PJK. ABT & AP 01

Lampiran 4

SUBSID PAJAK
LAMPIRAN PERATURAN GOVERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 41 TAHUN 2012
TANGGAL : 3 JUNI 2012

STOTS P. 004

**NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR PERMUKAAN**

NO	PERUNTUKAN	NPA
1.	INDUSTRI	
a.	a/d - 10.000 m ³	Rp 500,00 /m ³ /bulan
b.	10.001 - 50.000 m ³	Rp 550,00 /m ³ /bulan
c.	50.001 - 100.000 m ³	Rp 600,00 /m ³ /bulan
d.	100.001 - 500.000 m ³	Rp 650,00 /m ³ /bulan
e.	500.001 - 1.000.000 m ³	Rp 700,00 /m ³ /bulan
f.	Lebih dari 1.000.000 m ³	Rp 750,00 /m ³ /bulan
2.	PERUSAHAAN AIR MINUM / PDAM	
a.	a/d - 100.000 m ³	Rp 112,00 /m ³ /bulan
b.	100.001 - 500.000 m ³	Rp 118,00 /m ³ /bulan
c.	Lebih dari 500.000 m ³	Rp 124,00 /m ³ /bulan
3.	PERUSAHAAN PERCEBUNAN	
a.	Tebu giling	Rp 23.100,00 /HA/bulan
b.	Tebu bibit	Rp 42.350,00 /HA/bulan
c.	Tebu tunas	Rp 32.000,00 /HA/bulan
d.	Tanaman tembakau	Rp 32.000,00 /HA/bulan
e.	Tanaman rosela dan lainnya	Rp 32.000,00 /HA/bulan
f.	Tembaku bibit	Rp 21.400,00 /HA/bulan
g.	Tanaman pangan, ternak & ikan	Rp 32.000,00 /HA/bulan
4.	PERTANIAN BUDIDAYA DAN PERTANIAN TANAMAN LAINNYA DI LUAR PERTANIAN BAKYAT	Rp 32.000,00 /HA/bulan
5.	SARANA REKREASI/PEMANDIAN	Rp 500,00 /m ³ /bulan
6.	PENGGELONTORAN DAN PENGINDEH MESIN, KOLAM IKAN, PENCUCIAN DAN PETERNAKAN	
a.	a/d - 10.000 m ³	Rp 470,00 /m ³ /bulan
b.	10.001 - 50.000 m ³	Rp 500,00 /m ³ /bulan
c.	50.001 - 100.000 m ³	Rp 540,00 /m ³ /bulan
d.	100.001 - 500.000 m ³	Rp 580,00 /m ³ /bulan
e.	500.001 - 1.000.000 m ³	Rp 620,00 /m ³ /bulan
f.	Lebih dari 1.000.000 m ³	Rp 660,00 /m ³ /bulan
7.	PEMBANGKIT LISTRIK	Rp 100,00 /KWIS
8.	PERTAMINA DAN KONTRAKTORNYA	Rp 350,00 /m ³ /bulan
9.	USAHA KECIL / KOPERASI	
a.	Tebu giling	Rp 11.900,00 /HA/bulan
b.	Tebu bibit	Rp 10.000,00 /HA/bulan
c.	Tebu tunas	Rp 5.000,00 /HA/bulan
d.	Tanaman tembakau	Rp 5.000,00 /HA/bulan
e.	Tembaku bibit	Rp 5.000,00 /HA/bulan
f.	Tanaman rosela dan lainnya	Rp 5.000,00 /HA/bulan

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TGL. 4 - 6 - 2012. No 41 Th 2012 / D

GUBERNUR JAWA TIMUR
M. S. GORONTALO

Lampiran 5



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 6976 /UN.25.1.4/PM/2014
Lampiran : Satu Bendel
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

26 AUG 2014

Yth. Kepala UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur
Jl. Kalimantan No. 42
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Mohammad Iqbal	110803101004	D3 - Manaj. Perusahaan
2.	Muamar Hamidi	110803101034	D3 - Manaj. Perusahaan
3.	Ferdi Purnomo	110803101080	D3 - Manaj. Perusahaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 01 September - 01 Oktober 2014

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si
NIP. 19661020 199002 2 001
Dekan
Pembantu Dekan I,

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Lampiran 6

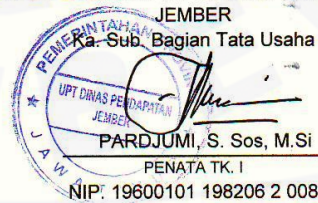
**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER**

NAMA : MOHAMAD IQBAL
NIM : 110803101004
PROGRAM STUDY : Manajemen Perusahaan

NO	TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	SENIN, 01-09-2014	1.	
2	SELASA, 02-09-2014	2.	
3	RABU, 03-09-2014	3.	
4	KAMIS, 04-09-2014	4.	
5	JUMAT, 05-09-2014	5.	
6	SENIN, 08-09-2014	6.	
7	SELASA, 09-09-2014	7.	
8	RABU, 10-09-2014	8.	
9	KAMIS, 11-09-2014	9.	
10	JUMAT, 12-09-2014	10.	
11	SENIN, 15-09-2014	11.	
12	SELASA, 16-09-2014	12.	
13	RABU, 17-09-2014	13.	
14	KAMIS, 18-09-2014	14.	
15	SENIN, 22-09-2014	15.	
16	SELASA, 23-09-2014	16.	
17	RABU, 24-09-2014	17.	
18	KAMIS, 25-09-2014	18.	
19	JUMAT, 26-09-2014	19.	
20	SENIN, 27-09-2014	20.	
21	SELASA, 28-09-2014	21.	
22	RABU, 29-09-2014	22.	
23	KAMIS, 30-09-2014	23.	

a. n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

Ka. Sub. Bagian Tata Usaha



Lampiran 7



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS JEMBER

Jl. Kalimantan No. 42, Kode Pos : 68121 Telp. (0331) 332088 Fax. (0331) 323300 Jember (68121)

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Kedisiplinan	80	Delapan Puluh
2	Ketertiban	80	Delapan Puluh
3	Prestasi Kerja	80	Delapan Puluh
4	Kesopanan	80	Delapan Puluh
5	Tanggung Jawab	80	Delapan Puluh

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

N A M A : MOHAMAD IQBAL
N I M : 110803101004
PROGRAM STUDI : D3-Manajemen Perusahaan

Identitas Penilai :

N A M A : PARDJUMI, S. Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Instansi : UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Jember

Tanda tangan dan
Stempel Lembaga

Jember, 09 Oktober 2014
A. N. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

Ka. Sub. Bagian Tata Usaha



PEDOMAN PENILAIAN

No.	ANGKA	KRITERIA
1.	80 ≥	Sangat Baik
2.	70 - 79	Baik
3.	60 - 69	Cukup Baik
4.	50 - 59	Kurang Baik

Lampiran 8



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS JEMBER
Jl. Kalimantan No. 42, Telp. (0331) 332088 Fax. (0331) 323300 Jember (68121)

Jember, 27 Agustus 2014

Nomor : 421.1/2/37/120.371/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tempat PKN

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember
di -
JEMBER

Menunjuk Surat Saudara tanggal 26 Agustus 2014 Nomor :
6476/UN25.1.4/PM/2014 perihal Permohonan Tempat PKN, sehubungan dengan
hal tersebut kami tidak keberatan menerima mahasiswa yang bernama :

1. MOHAMMAD IQBAL
2. FERDI PURNOMO

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata mulai tanggal 01 September s/d
01 Oktober 2014 pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi
Jawa Timur Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PARDJUMI S. Sos. M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19600101 198206 2 008

Lampiran 9



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
JEMBER

Jl. Kalimantan No. 42, Telp. (0331) 332088 Fax. (0331) 332088 Jember (68121)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARDJUMI, S. Sos, M.Si
NIP : 19600101 198206 2 008
Pangkat / Golongan : Penata TK. I / III-d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MOHAMAD IQBAL
Nim : 110803101004
Jurusan : D3 – MANAJEMEN PERUSAHAAN
Fakultas : EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Sejak tanggal 03 September 2014 s/d 03 Oktober 2014, telah melaksanakan
Praktek Kerja Nyata (PKN) pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Jember dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Jember, 09 Oktober 2014

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

JEMBER
Kepala Sub Bagian Tata Usaha







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI-UNIVERSITAS JEMBER

Nama : MUHAMMAD IQBAL
NIM : 110803101004
Program Studi : D3 - Manajemen Perusahaan
Judul Laporan PKN : PELAKSANAAN KEGIATAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PADA IPT. DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR.
Dosen Pembimbing : Dr. Bambang Irawan, M.Si.
TMT_Persetujuan : 27 Agustus 2014 s/d 27 Februari 2014
Perpanjangan : 27 Februari 2014 s/d 27 April 2014

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	7/Sept 2014	konultasi draft proposal lap PKN	
2.		keputusan & revisi	2.....
3.	22/Sept 2014	konultasi draft lap. PKN	3.....
4.			4.....
5.		Sub I : 7	5.....
6.		Sub II	6.....
7.		Sub III	7.....
8.		Sub IV	8.....
9.		Sub V	9.....
10.			10.....
11.	14/Jan 2014	ke untuk daftar ulang lap PKN	11.....
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Jember, 05 September 2014
Dosen Pembimbing

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR PERMUKAAN PADA UPT DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR
JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MOHAMAD IQBAL
N.I.M : 110803101004
Program Studi : MANAJEMEN PERUSAHAAN
Jurusan : MANAJEMEN

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

05 Maret 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Dr. Hadi Wahyono, M.M.
NIP. 19540109 198203 1 003

Sekretaris,

Drs. NG. Krishnabudi, M.Agb.
NIP.19630402 198802 1 001

Anggota,

Drs. Sampeadi, M.S.
NIP. 19560404 198503 1 002

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

FOTO
4X6

Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E.,M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001